

BAB I

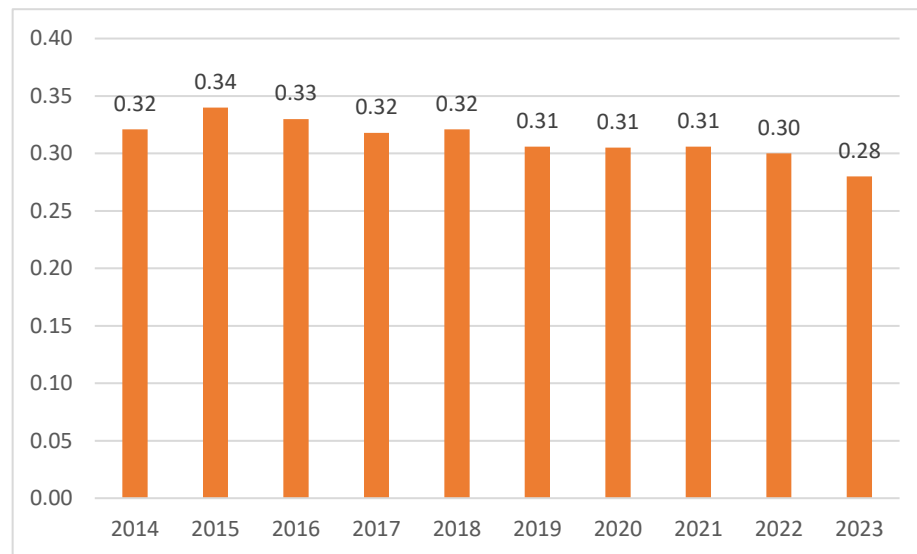
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan isu yang sering kali muncul dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi adalah upaya yang diimplementasikan oleh pemerintah dalam rangka memajukan sistem perekonomian serta kesejahteraan masyarakat (BPS,2023). Ketimpangan pendapatan umumnya dialami oleh negara-negara berkembang salah satunya yaitu Indonesia. Ketimpangan pendapatan merupakan keadaan di mana pendapatan tidak terdistribusi secara merata pada suatu penduduk (Perdana Mahadi dkk., 2022). Berkenaan dengan pengukuran ketimpangan pendapatan, indeks gini merupakan salah satu instrumen yang tepat untuk diaplikasikan. Adapun nilai yang terdapat dalam indeks gini yaitu berada pada rentang 0 hingga 1. Jika nilainya mendekati 0 hal tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin kecil, namun jika mendekati 1 ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin besar (Wibowo & Pangestuty, 2023).

Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi yang mencakup dua belas wilayah kabupaten dan tujuh wilayah perkotaan di mana setiap daerah mempunyai perekonomian, dan kekayaan alam yang berbeda. Perbedaan ini dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di mana kawasan yang berlimpah dengan sumber daya alam menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan kawasan dengan keterbatasan potensi sumber daya alam, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan pendapatan antar daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2023) Provinsi Sumatera Barat tercatat menduduki posisi kelima dalam pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera, yang mana memiliki kontribusi sebesar 6,92% terhadap perekonomian di Pulau Sumatera. Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2024) nilai indeks gini Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,28 yang mana terjadi penurunan sebesar 0,02 dibanding tahun 2022, meskipun nilai indeks gini terjadi penurunan dan angka ketimpangan tersebut tergolong rendah, namun permasalahan tersebut harus diatasi oleh pemerintah agar ketimpangan pendapatan pada tahun-

tahun berikutnya tidak mengalami kenaikan. Menurut Feraliani, Valeriani, dan Yusnita (2021) jika ketimpangan semakin besar dan terus menerus dibiarkan hal ini dapat mengakibatkan berbagai permasalahan yang menimbulkan ketidakstabilan dalam perekonomian. Secara umum ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat dapat ditunjukkan dari perkembangan indeks gini Provinsi Sumatera Barat, berikut data indeks gini Provinsi Sumatera Barat disajikan pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2023

Sumber : (Data dari BPS Sumatera Barat, 2024). Data diolah

Pada tahun 2015, data menunjukkan bahwa koefisien gini Provinsi Sumatera Barat naik 0,2 dari tahun sebelumnya. Meskipun indikator ini menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya namun, penurunan ini relatif melambat hingga pada tahun 2023 koefisien gini Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 0,28, meskipun terjadinya penurunan hal tersebut tidak menjadi penentu bahwa ketimpangan pendapatan pada daerah juga menurun. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat yang mana indeks gini kabupaten/kota di Sumatera Barat disajikan pada tabel 4.1

Beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah. Menurut Todaro dalam Perdana Mahadi dkk (2022) ketimpangan pendapatan dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya. Ketimpangan pendapatan dapat diperburuk oleh ekspansi ekonomi yang cepat yang sering kali tidak disertai dengan distribusi yang merata. Dengan demikian, hal ini berbanding terbalik dengan keberhasilan pembangunan. Menurut Teori Kuznets dalam Caesarisma, Evanty dan Hamrullah (2023) pertumbuhan ekonomi berkaitan langsung dengan ketimpangan pendapatan, yang mana saat produktivitas tenaga kerja meningkat hal ini berdampak positif terhadap output. Peningkatan output menunjukkan bahwa pekerja di daerah tersebut bekerja secara efektif dan memiliki pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga menurunkan ketimpangan pendapatan.

Selain pertumbuhan ekonomi, pendidikan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Menurut Sugiarti dan Erdkhadifa (2023) pendidikan menjadi faktor penentu upah yang akan diterima oleh pekerja yang mana memungkinkan terjadinya perbedaan pendapatan seiring dengan adanya perbedaan tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Jika pekerja telah menempuh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka memungkinkan pekerja tersebut mendapatkan upah yang lebih besar, namun sebaliknya jika pekerja menempuh pendidikan yang rendah maka pekerja akan menerima upah yang lebih rendah. Angka partisipasi murni adalah indikator yang menggambarkan persentase penduduk dalam kelompok usia tertentu yang masih menempuh pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut. Di samping itu, angka partisipasi murni dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat menjadi indikator pendidikan yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena sekitar 33 dari 100 penduduk Provinsi Sumatera Barat menamatkan pendidikan tertinggi yaitu SMA/ sederajat.

Ketimpangan pendapatan memiliki keterkaitan bukan hanya pada faktor pendidikan saja, namun juga dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia

(IPM). IPM berfungsi sebagai parameter utama dalam mengukur kemajuan kualitas sumber daya manusia. Menurut BPS Indonesia (2023) terdapat tiga aspek utama yang mempengaruhi IPM yakni, aspek umur panjang dan hidup sehat, aspek pengetahuan dan aspek standar hidup yang layak. Menurut Todaro & Smith (2003) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih mencerminkan ketidakseimbangan distribusi pendapatan jika dibandingkan dengan indikator pembangunan lainnya. Dalam mencapai pembangunan manusia di suatu wilayah ada empat kategori dalam status capaiannya yaitu sangat tinggi untuk $IPM \geq 80$, tinggi untuk $70 \leq IPM < 80$, sedang untuk $60 \leq IPM < 70$, dan rendah dengan $IPM < 60$ (BPS, 2024).

Mengacu kepada data dari BPS Sumatera Barat (2024) IPM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2014-2023 yang mana mencapai sebesar 73,75% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa IPM Provinsi Sumatera Barat berada pada nilai ($70 \leq IPM < 80$) yang tergolong dalam status pencapaian pembangunan kelompok tinggi. Angka tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Provinsi Sumatera Barat memiliki kualitas hidup yang baik dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Menurut Bhagaskara (2023) pembangunan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh peran masyarakat yang berkualitas. Jika perbedaan kondisi geografis, potensi sumber daya alam, dan sosial budaya menjadi penghambat untuk kemajuan daerah, salah satu cara untuk dapat mewujudkan pembangunan yang merata pada kondisi tersebut adalah dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia. Pada dasarnya meningkatnya IPM dapat mengurangi ketimpangan pada daerah tersebut, namun hal ini bergantung pada kebijakan pembangunan yang diterapkan serta sejauh mana masyarakat mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang merata.

Selain indeks pembangunan manusia, upah minimum turut menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Secara ekonomi upah merupakan besaran nominal yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja sebagai bentuk imbalan atas waktu dan tenaga yang dikorbankan oleh pekerja dalam kegiatan produksi (Wibowo dan Pangestuty, 2023). Disamping itu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 yang

mengatur perubahan pasal-pasal mengubah istilah Upah Minimum Regional (UMR), yang mana dari Upah Minimum Regional tingkat 1 diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional tingkat II menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Disamping itu, untuk ketetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Sumatera Barat nilainya mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP), artinya seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menggambarkan upah minimum yang sama masing-masing daerah. Menurut data dari BPS Sumatera Barat (2024), upah minimum di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kenaikan yang signifikan pada tahun 2014-2023 yang mana mencapai Rp2.742.467,00 pada tahun 2023.

Berdasarkan uraian di atas, ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2023 cenderung menunjukkan penurunan, namun hal ini berbeda dengan kondisi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang mana menunjukkan pergerakan fluktuatif, disamping itu hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan pendapatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin mengkaji lebih lanjut dengan penelitian berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2023". Penelitian ini mengacu pada penelitian Tsaurai (2020) yang menggunakan metode GMM panel dinamis sebagai metode penelitian. Adapun model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data panel dinamis. Menurut Tarmizi (2023) analisis data panel dinamis adalah pengembangan dari analisis data panel statis dengan memasukkan variabel lag dari variabel dependen ke dalam model. Disamping itu, adanya hubungan antara variabel-variabel yang bersifat dinamis dalam jangka panjang, maka diperlukan modifikasi dari model panel statis menjadi panel dinamis.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya, adapun rumusan masalah dapat ditulis sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh angka partisipasi murni terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat ?
4. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh angka partisipasi murni terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, sehingga dapat menjadi acuan untuk mengkaji lebih lanjut dan membandingkan ketimpangan pendapatan di provinsi lain.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam upaya mengatasi ketimpangan pendapatan.